



**KOTA DENPASAR**

**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR**



## KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyampaikan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2026.

Rencana Kerja memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka pelaksanaan misi organisasi. Rencana Kerja ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja kegiatan dan program sehingga memudahkan untuk mengukur capaian kinerjanya. Selanjutnya Rencana Kerja sebagai komitmen kinerja yang hendak dicapai, diajukan sebagai bahan dalam suatu penetapan kinerja sebagai kesepakatan terhadap Rencana Kerja.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Om Santi , Santi, Santi Om.

Denpasar, 4 Agustus 2025  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Denpasar,

**Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH., M.Si**

Pembina Tk I

Nip. 196704181997031002



**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB. II . EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN LALU .....</b>	<b>5</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar .....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.....	21
2.3. Isu – isu Strategis penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja.....	22
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	23
<b>BAB. III . TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>32</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar .....	37
3.3. Program dan Kegiatan .....	37
<b>BAB. IV . RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR.....</b>	<b>44</b>
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan .....	44
<b>BAB.V . PENUTUP .....</b>	<b>48</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar yang berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Di dalam Pasal 12 Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masalah penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, maka penyusunan Renja Satpol PP perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kota Denpasar tahun 2021–2026, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka dilakukan penjabaran ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dalam pengukuran kinerja ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu, perjanjian, pengumpulan data dan cara pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja sebagai dokumen perencanaan ini mengakomodasi faktor politis dan aspiratif sehingga secara resmi mengikat seluruh aparat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam melaksanakan kegiatan perekonomian dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, disamping untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.



### **Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar**

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dilaksanakan dengan memperhatikan Visi Kota Denpasar yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Visi : ***“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”*** dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2025-2029 disusun misi antara lain:

- 1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- 2) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
- 3) Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- 4) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
- 5) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Mengacu kepada visi dan misi Kota Denpasar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar, maka tugas pokok dan fungsinya adalah: **“Membantu Walikota menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat”**

#### **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 );
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);



- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. seharusnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mejadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan
- m. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7)
- n. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar 2021 – 2026
- o. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025
- p. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar 2021 – 2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renja Satpol PP Kota Denpasar Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan



---

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mencakup :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP



# BAB II

## EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. **Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:**
- b. **Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan:**
- c. **Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan:**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2024 diwujudkan dalam 2 Program, 8 kegiatan dan 18 sub kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2024 dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp 32.349.910.825 dengan realisasi mencapai Rp 27,542,931,244.00 dengan persentase serapan dana APBD mencapai 85.14%.



Sedangkan untuk capaian kinerja Rentra Tahun 2024 disajikan dalam table berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar	95,50%	96.68%	100%

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022 diwujudkan dalam 2 Program, 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2023 dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp 24,027,558,071 dengan realisasimencapai Rp 21,666,842,750 dengan persentase serapan dana APBD mencapai 90.17%. Untuk target dan realiasi renstra renstra tahun 2022 dan 2023 perbandingannya dapat disajikan dalam tabel berikut

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar	85,28%	95,50%	95,07%	96.68%

### 2.1.1 Realisasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dan capaian fisik sebesar 100% sedangkan keuangannya realisasinya sebesar 85.14 %. Dalam pelaksanaan anggaran di tahun



2024 ada beberapa kali pergeseran atau rasionalisasi terhadap anggaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Sedangkan Akuntabilitas keuangan yang dicapai oleh Sat.Pol PP Kota Denpasar tahun 2024 berdasarkan alokasi langsung per program dan kegiatan dapat disajikan sebagai berikut :

Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2024

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>32,349,910,825.00</b>	<b>27,542,931,244.00</b>	<b>4,806,979,581.00</b>	85.14
Belanja Pegawai	21,004,526,025.00	17,259,219,742.00	3,745,306,283.00	82.16
Belanja Barang dan Jasa	8,053,384,800.00	7,284,971,502.00	768,413,298.00	90.45
Belanja Modal	3,292,000,000.00	2,998,740,000.00	293,260,000.00	91

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra  
Perangkat Daerah s/d Tahun 2024  
Kota Denpasar

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 =7+9	11=10/4
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>									
	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja Perangkat Daerah</b>	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi</b>	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		<b>Keuangan Perangkat Daerah</b>								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah terbayarnya gaji pegawai	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang		105 Orang	105 Orang	100 %
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Peresentase layanan kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	227 paket	227 paket	227 paket	227 paket		227 paket	227 paket	100 %
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket		1 Paket	1 paket	100 %

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		n Bangunan Kantor yang Disediakan								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket		1 Paket	1 paket	100 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	umlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket		1 Paket	1 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dolumen		3 dokumen	3 dolumen	100 %

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Undangan yang Disediakan								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 laporan	1 Laporan	100 %
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 laporan	1 Laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 laporan	1 Laporan	100 %

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik Daerah</b>	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100 %
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai</b>	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	56 Unit	56 Unit	56 Unit	56 Unit		56 Unit	56 Unit	100 %
	Pemeliharaan Aset Tetap	Jumlah Aset	137 Unit	137 Unit	137 Unit	Unit		137 Unit	Unit	100 %

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Lainnya	Tetap Lainnya yang Dipelihara								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100 %
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara								100 %
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda</b>	90.84	93.84	3.21	3.06		3.21	3.06	100 %
		<b>Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3</b>	91.45	100	89.43	100		89.43	100	100 %
		<b>Rasio Satlinmas</b>	3.21	3.06	89.84	93.84		89.84	93.84	100 %
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus		250 Kasus	250 Kasus	100 %

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani								
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Daerah dan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100 %

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani								
	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani</i>	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus	250 Kasus		250 Kasus	250 Kasus	100 %
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100 %

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR



Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan								
		Penindakan								
	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR**





**1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2024 secara keseluruhan telah mencapai target kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2024 Pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan tersebut mendukung indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis yang ada pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Secara keseluruhan realisasi program,kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2024 telah tercapai 100% sehingga dari 2 program dan 8 kegiatan, tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.

**2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dari 2 program, 8 kegiatan dan 18 sub kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan telah memenuhi target/kinerja yang ditetapkan Tahun 2024, antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dimana didalamnya terdapat 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Adapun persentase capaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26,982,116,244

b. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang terdapat 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan Adapun presentase capaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 560,815,000

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai berikut :

1. Mengingat mobilitas penduduk yang relatif tinggi dan dengan terbitnya Perda yang baru merupakan salah satu sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui/memahami Perda/Perkada.



2. Kompetensi dan jumlah aparatur yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja saat ini belum optimal dalam melayani tuntutan masyarakat di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.
3. Belum optimalnya sinergitas antar Perangkat Daerah dengan Satpol PP
4. Terbatasnya jumlah anggota Satpol PP yang ada;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

### **3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pada Perangkat Daerah Satpol PP Kota Denpasar tidak terdapat program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

### **4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah**

Implikasi atau dampak yang timbul dari target capaian program pada Satpol PP Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- Terhadap program/kegiatan yang realisasinya telah memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berdampak positif bagi kinerja perangkat daerah.
- Terhadap program/kegiatan yang realisasi keuangannya belum memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berdampak pada penyerapan anggaran Perangkat Daerah.

### **5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diuraikan seperti di atas adalah:

- (1) Terkait permasalahan tersebut, Satpol PP secara proaktif melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait perangkat daerah khususnya insiator Perda serta meningkatkan koordinasi/sinergitas serta terus berupaya mempelajari serta memahami aturan –aturan yang dimuat dalam Perda/Perkada sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya di lapangan.



(2) Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat baik masyarakat umum, masyarakat pengusaha termasuk melalui pembinaan dan pengawasan, serta secara berkelanjutan terus melaksanakan pembinaan teknis guna meningkatkan kompetensi aparatur Pol PP sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(3) Memberikan sosialisai dan motivasi kerja kepada aparatur Pol PP secara intensif;

Selanjutnya disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

**Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar  
sampai dengan Tahun 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA RENSTRA TAHUN					REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN	
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024
	Meningkatnya Kualitas layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar yang dapat diselesaikan	84,78%	85,28%	85,78%	86,28%	87,28%	95,07%	96.98%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

### Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur organisasi Sat. Pol. PP Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan



Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dengan kedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Susunan Organisasi Satuan Polisi pamong Praja Kota Denpasar terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari :
  - a. Seksi Operasional dan Pengendalian
  - b. Seksi Penertiban
4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan, Penyuluhan, dan Pengawasan
  - b. Seksi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari:
  - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
  - b. Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas
6. Bidang Sumber Daya Aparatur, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari:
  - a. Seksi Pelatihan Dasar
  - b. Seksi Teknis Fungsional

Sat.Pol. PP Kota Denpasar memiliki peranan yang strategis karena diposisikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan segala program turunan kegiatan yang berkaitan Penegakkan hukum utamanya adalah penegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwali) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Serta sebagai pelaksana ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat



**Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar**

**antara lain :**

- a. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar.
- b. Masih kurangnya wawasan, dan keterampilan, Personil Sat.Pol PP serta keterbatasan jumlah personil anggota Satpol PP Kota Denpasar
- c. Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perwali di Kota Denpasar
- d. belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda
- e. keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat di tatanan Pemerintahan Desa / Lurah Perlu lebih diberdayakan lagi dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban

**Upaya –upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan permasalahan tersebut yaitu :**

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar lembaga dalam pelaksanaan kegiatan Sat.Pol PP.
2. Meningkatkan pola penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan patroli.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap hal hal yang bersentuhan langsung dengan ketertiban umum.
4. Meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi serta pedoman dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah selaku pihak penginisiasi Perda dan Perwali.
5. Mengintensifkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, generasi muda dan prajuru adat dan elemen Linmas di tingkat desa.



6. Meningkatkan Sat. Linmas sebagai bagian dari Sat.Pol. PP untuk berperan aktif penegakkan perda dan Perwali

Setelah dilakukan pengukuran dari kinerja Tahun 2023 diperoleh hasil capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sebesar 100%. Dengan capaian kinerja tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dapat dikategorikan sebagai Perangkat Daerah yang baik dalam capaian kinerja. Yang disajikan dalam tabel berikut :



**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan**  
**Pemerintah Daerah**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar**  
**sampai dengan Tahun 2024**

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA RENSTRA TAHUN					REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN	
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024
1	Urusan Ketgentraman, keteriban umum dan perlindungan masyarakat	%	84,78%	85,28%	85,78%	86,28%	87,28%	95,07%	96.98%



### **2.3 Isu Strategis Penyelenggara Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra , maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan polisi Pamong Praja. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dirumuskan sebagai berikut :

**Perlunya Peningkatan Kualitas Penegakan Perda dan Perwali serta penanganan gangguan Tramtibum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Denpasar, yang disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat Satpol PP, dengan meningkatkan sinergitas antar lembaga dan partisipasi Masyarakat**

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD :**

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Satuan Polisi Pamong Praja dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Satuan Polisi Pamong Praja disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:



Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhandana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Denpasar	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100 %</b>	<b>32,246,541,758</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kota Denpasar	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100 %</b>	<b>32,246,541,758</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Denpasar	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	27,888,008,774	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Denpasar	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	27,888,008,774	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	188 Orang	27,888,008,774	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	188 Orang	27,888,008,774	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Denpasar	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>415,941,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Denpasar	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>415,941,000</b>	

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR**



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhandana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,805,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,805,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	287,055,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	287,055,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,800,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,800,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,709,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,709,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	14,784,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	14,784,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1 Laporan	83,788,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1 Laporan	83,788,000	

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR**



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhandana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Denpasar	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>836,961,984</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Denpasar	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>836,961,984</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	222,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	222,600,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	614,361,984	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	614,361,984	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Denpasar	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1,125,507,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Denpasar	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1,125,507,000</b>	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	61 Unit	815,207,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	61 Unit	815,207,000	

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR**



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhandana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	310,300,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	310,300,000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Denpasar	<b>Peresntase layanan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>581,116,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Denpasar	<b>Peresntase layanan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>581,116,000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	188 paket	581,116,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	188 paket	581,116,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Denpasar	<b>Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai</b>	<b>100 %</b>	<b>1,399,007,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Denpasar	<b>Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai</b>	<b>100 %</b>	<b>1,399,007,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	1,197,970,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	1,197,970,000	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	6,520,000	Pemeliharaan Mebel	Kota Denpasar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	6,520,000	

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR**



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhandana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	94,517,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	94,517,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kota Denpasar	<b>Persentase Kasus Pelanggaran Perda/Perwali yang diselesaikan</b>	<b>94.84%</b>	<b>951,676,000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kota Denpasar	<b>Persentase Kasus Pelanggaran Perda/Perwali yang diselesaikan</b>	<b>95.34%</b>	<b>951,676,000</b>	
			<b>Persentase Laporan gangguan trantibum yang dilaksanakan SatLinmas</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase Laporan gangguan trantibum yang dilaksanakan SatLinmas</b>	<b>100%</b>		
			<b>Persentase Kasus Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase Kasus Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>		

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR**



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhandana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<b>Persentase peningkatan kapasitas Pol PP</b>	100%				<b>Persentase peningkatan kapasitas Pol PP</b>	100%		
	<b>Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah</b>	Kota Denpasar	<b>Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani</b>	<b>500 Kasus</b>	<b>627,586,000</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Kota Denpasar	<b>Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani</b>	<b>500 Kasus</b>	<b>627,586,000</b>	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	627,586,000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	627,586,000	
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Denpasar	<b>Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani</b>	<b>500 Kasus</b>	<b>324,090,000</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Denpasar	<b>Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani</b>	<b>500 Kasus</b>	<b>324,090,000</b>	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan	1 laporan	132,450,000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan	1 laporan	132,450,000	

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR**



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhandana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Kota Denpasar	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	50 Orang	135,935,000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Kota Denpasar	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	50 Orang	135,935,000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	46,905,000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	46,905,000	
	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan	1 Laporan	8,800,000	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan	1 Laporan	8,800,000	

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA DENPASAR



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhandana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Perda dan Perkada yang Terlayani					Perda dan Perkada yang Terlayani			



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja Tahun 2026 juga mengakomodir berbagai usulan dari para *stakeholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Satuan polisi Pamong Praja terkait rencana pencapaian target RPJMD Kota Denpasar dan Renstra Satuan polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2025-2029

# **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

## **PERANGKAT DAERAH**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional

### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.**

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 tertuang Hal – hal sebagai berikut :

TEMA PEMBANGUNAN :

“MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN” PRIORITAS NASIONAL

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas & berdaya saing
4. Revolusi mental & pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

7. Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik

Sedangkan yang menjadi Tema dan prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 adalah:

“PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH.” Dengan PRIORITAS :

1. Pertanian, kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata
2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan
3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Lingkungan Hidup
6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Tema dan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

“ MEMPERKUAT DAYA SAING DEGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH UNTUK DENPASAR MAJU”

Prioritas Pembangunan Tahun 2026 :

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Ekonom Kreatif, Pariwisata dan kebudayaan
3. Sosial dan ketenagakerjaan
4. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan
5. Reformasi Birokrasi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Kota Denpasar Tahun 2025, Renja Satpol PP Kota Denpasar Tahun 2026 mendukung prioritas Pembangunan Kota yaitu Infrasturktur dan Stabilitas Keamanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yaitu penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota (Perda dan Perwali), serta sebagai

OPD yang mengemban tugas dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, serta aspek perlindungan masyarakat,

### **3.2. Tujuan dan Sasaran**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor- faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan fungsi Penegakkan hukum, dalam hal ini adalah penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota (Perda dan Perwali), serta sebagai OPD yang mengemban tugas dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, serta aspek perlindungan masyarakat. Tujuan dan sasaran Renja Satpol PPKota Denpasar Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Satpol PP Kota Denpasar 2025 – 2029, adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Terkendalinya Keamanan dan ketertiban Umum

b. Sasaran :

Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Satpol PP Kota Denpasar**

No	Tujuan /Sasaran	Indikator	TARGET 2026
1	Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	97.98%

### 3.3 Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan visi dan misi Kota Denpasar.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2026 maka program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**Rumusan Rencana Program Kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027**

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				33,198,217,758				34.684.466.245
	<b>PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>100 %</b>	<b>32,246,541,758</b>	<b>APBD Kota Denpasar</b>		<b>100 %</b>	<b>33.171.399.745</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</b>	<b>100 %</b>	<b>27,888,008,774</b>	<b>APBD Kota Denpasar</b>		<b>100 %</b>	<b>25.239.501.088</b>

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188 Orang	27,888,008,774	APBD Kota Denpasar		188 Orang	25.239.501.088
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>415,941,000</b>	<b>APBD Kota Denpasar</b>		<b>100 %</b>	<b>549.439.813</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	6,805,000	APBD Kota Denpasar		1 Paket	8.952.750
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	287,055,000	APBD Kota Denpasar		1 paket	351.755.388
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	10,800,000	APBD Kota Denpasar		1 Laporan	12.420.000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	12,709,000	APBD Kota Denpasar		1 Paket	18.031.425
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	14,784,000	APBD Kota Denpasar		3 Dokumen	16.836.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	83,788,000	APBD Kota Denpasar		1 Laporan	141.444.250
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>836,961,984</b>			<b>100 %</b>	<b>3.215.238.000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	222,600,000	APBD Kota Denpasar		1 laporan	249.550.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	614,361,984	APBD Kota Denpasar		1 laporan	2.965.688.000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>1,125,507,000</b>			<b>100 %</b>	<b>1.937.271.945</b>
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61 Unit	815,207,000	APBD Kota Denpasar		61 Unit	755.071.945
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	310,300,000	APBD Kota Denpasar		2 Unit	1.182.200.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>581,116,000</b>			<b>100 %</b>	<b>665.946.600</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188 paket	581,116,000	APBD Kota Denpasar		188 paket	665.946.600
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai</b>		<b>100 %</b>	<b>1,399,007,000</b>			<b>100 %</b>	<b>1.564.002.300</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Kota Denpasar, Semua Kecamatan,	60 Unit	1,197,970,000	APBD Kota Denpasar		60 Unit	1.267.152.800

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kelurahan						
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	6,520,000	APBD Kota Denpasar		15 Unit	7.222.000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135 Unit	94,517,000	APBD Kota Denpasar		135 Unit	94.127.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	100,000,000	APBD Kota Denpasar		1 Unit	195.500.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Kasus Pelanggaran Perda/Perwali yang diselesaikan</b>		<b>94.84%</b>	<b>951,676,000</b>			<b>95.34%</b>	<b>1.513.066.500</b>
		<b>Persentase Laporan gangguan trantibum yang dilaksanakan SatLinmas</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<b>Persentase Kasus Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang diselesaikan</b>		100%				100%	
		<b>Persentase peningkatan kapasitas Pol PP</b>		100%				100%	
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani</b>		<b>500 Kasus</b>	<b>627,586,000</b>	<b>APBD Kota Denpasar</b>		<b>500 Kasus</b>	<b>673.967.850</b>
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	627,586,000	APBD Kota Denpasar		1 Laporan	673.967.850
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani</b>		<b>500 Kasus</b>	<b>324,090,000</b>	<b>APBD Kota Denpasar</b>		<b>500 Kasus</b>	<b>839.098.650</b>
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 laporan	132,450,000	APBD Kota Denpasar		1 laporan	158.389.500

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kelurahan						
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	135,935,000	APBD Kota Denpasar		50 Orang	616.665.650
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	46,905,000	APBD Kota Denpasar		1 Dokumen	53.923.500
	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	8,800,000	APBD Kota Denpasar		1 Laporan	10,120,000



# **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SAT.POLPP KOTA DENPASAR**

## **4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bias membantu perangkat daerah mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya rencana perangkat daerah, dalam hal ini pimpinan akan memahami skala prioritas dengan lebih baik. Rencana kerja juga dapat membantu aparatur dalam perangkat daerah melaksanakan kegiatan dengan baik dan teratur, disamping itu rencana kerja yang tersusun dengan baik, akan menghasilkan pembagian tugas yang baik pula. Sebagaimana diuraikan dalam Bab III, mengenai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk 5 tahun kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Dalam pelaksanaan pembangunan urusan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2026 ini seluruh kegiatan diarahkan untuk mendukung kesuksesan visi misi Kota Denpasar dan visi misi Walikota – Wakil Walikota terpilih serta merealisasikan target pada urusan wajib pelayanan dasar, untuk lebih jelasnya pada tabel dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut keterkaitan sasaran, indikator sasaran, target yang ditetapkan pada tahun 2026 serta program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukungnya disertai dengan sumber pendanaannya



**Tabel 4.1**  
**Rencana Program Kegiatan sub kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kota Denpasar Tahun 2026**

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</b>	<b>100 %</b>	<b>32,246,541,758</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	27,888,008,774
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	188 Orang	27,888,008,774
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>415,941,000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,805,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	287,055,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10,800,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,709,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	14,784,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	83,788,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>836,961,984</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	222,600,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	614,361,984
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Barang milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1,125,507,000</b>
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	61 Unit	815,207,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	310,300,000



No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Peresntase layanan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>581,116,000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	188 paket	581,116,000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik daerah yang layak pakai</b>	<b>100 %</b>	<b>1,399,007,000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	1,197,970,000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	6,520,000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	94,517,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Kasus Pelanggaran Perda/Perwali yang diselesaikan</b>	<b>94.84%</b>	<b>951,676,000</b>
		<b>Persentase Laporan gangguan trantibum yang dilaksanakan SatLinmas</b>	<b>100%</b>	
		<b>Persentase Kasus Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>	
		<b>Persentase peningkatan kapasitas Pol PP</b>	<b>100%</b>	
	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang tertangani</b>	<b>500 Kasus</b>	<b>627,586,000</b>
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	627,586,000
	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tertangani</b>	<b>500 Kasus</b>	<b>324,090,000</b>
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk	1 laporan	132,450,000



No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	50 Orang	135,935,000
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	46,905,000
	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	8,800,000

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2026**

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2026
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		
	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Persen	97.98%




## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2026 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2026 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJMD daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 serta mengacu pada evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kota Denpasar. Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2026 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak berkepentingan.

Denpasar, 4 Agustus 2025  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Denpasar,

  
**Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH., M.Si**  
Pembina Tk I  
Nip. 196704181997031002